

DINAMIKA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KOTA DI SERANG DAN TANTANGAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK

Sahira Warda¹, M. Rizkiyan², Salwa Nur Salsabila³

sahirawarda8@gmail.com¹, mrizkiyan772@gmail.com², salwanursalsa28@gmail.com³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Angkutan kota (angkot) masih menjadi moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Serang, terutama kelompok berpendapatan rendah, pelajar, dan pekerja sektor informal. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan angkot menghadapi permasalahan struktural yang menghambat efektivitasnya sebagai layanan publik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan angkot di Kota Serang melalui kajian literatur terhadap regulasi nasional dan daerah, penelitian terdahulu, laporan instansi pemerintah, serta perbandingan dengan kota-kota lain. Kajian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, ketidakteraturan trayek, rendahnya kualitas armada, serta meningkatnya persaingan dari transportasi online. Kondisi tersebut diperburuk oleh kurangnya modernisasi sistem dan ketiadaan integrasi antarmoda. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, digitalisasi pengawasan, dan modernisasi armada untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkot di masa mendatang.

Kata Kunci: Angkutan Kota, Transportasi Publik, Kota Serang, Kebijakan Transportasi.

ABSTRACT

Public minibas transportation (angkot) remains widely used in Serang City, particularly among low-income groups, students, and informal sector workers. However, previous studies indicate that angkot operations face structural challenges that undermine their effectiveness as a public service. This study evaluates the governance of angkot in Serang through a literature review of national and local regulations, previous research, government agency reports, and comparisons with other Indonesian cities. The findings reveal that the implementation of Local Regulation No. 13/2014 has been ineffective due to weak supervision, route irregularities, poor fleet quality, and growing competition from online transportation services. These issues are exacerbated by the lack of system modernization and absence of multimodal integration. This study highlights the need for regulatory reform, institutional strengthening, digital supervision systems, and fleet modernization to improve angkot service quality in the future.

Keywords: Public Transportation, Policy Evaluation, Serang City, Mobility Governance.

PENDAHULUAN

Transportasi publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung dinamika sosial dan ekonomi masyarakat urban. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki karakteristik mobilitas yang cukup kompleks, di mana sebagian besar masyarakat masih bergantung pada angkutan kota (angkot) sebagai salah satu moda transportasi utama. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah, pelajar, pedagang kecil, dan pekerja informal cenderung memanfaatkan angkot sebagai sarana transportasi harian karena aksesibilitas dan biaya perjalanan yang relatif terjangkau (Dinas Perhubungan Kota Serang, 2022). Namun seiring dengan perkembangan kota dan hadirnya moda transportasi baru, angkot berada dalam tekanan yang semakin besar baik dari sisi kualitas layanan maupun daya saing.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan angkot di Kota Serang menghadapi permasalahan yang tidak sederhana. Studi yang dilakukan oleh Gustiana (2017) menyebutkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 13 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan tidak berjalan optimal, karena banyak ketentuan inti seperti pengawasan trayek, penegakan sanksi, dan perizinan operasional tidak dilaksanakan secara efektif. Banyak pengemudi angkot menyimpang dari trayek resmi, melakukan praktik “ngetem” berlebihan, dan mengutamakan kepentingan ekonomi harian daripada kepastian layanan. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya fungsi regulasi dan rendahnya kapasitas kelembagaan dalam mengawasi layanan transportasi.

Kondisi armada angkot yang sudah tua turut memperburuk kualitas layanan. Berdasarkan laporan Dishub Serang (2021), sebagian besar armada telah berusia lebih dari sepuluh tahun dan tidak lagi memenuhi standar kenyamanan, keselamatan, maupun kelayakan teknis. Masalah ini sejalan dengan temuan Kusuma (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas armada merupakan faktor utama penurunan minat masyarakat terhadap angkot di banyak kota di Indonesia. Ketika armada tidak lagi terawat dan tidak mampu memberikan rasa aman, masyarakat semakin enggan menggunakan angkot.

Selain persoalan internal, kehadiran transportasi online memperburuk posisi angkot dalam persaingan moda transportasi. Kehadiran layanan ojek online dan mobil online memberikan alternatif perjalanan yang lebih cepat, nyaman, dan memiliki tarif transparan. Penelitian Sutrisno dan Purbaya (2020) menunjukkan bahwa transportasi online telah menggeser pola mobilitas masyarakat di Bandung secara signifikan. Gejala yang sama muncul di Serang, di mana masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih layanan berbasis aplikasi karena memberikan kepastian waktu dan fleksibilitas perjalanan. Persaingan antara angkot dan transportasi online tidaklah seimbang karena angkot masih beroperasi dengan sistem lama yang manual dan tidak terstandarisasi.

Jika melihat perkembangan transportasi di kota-kota lain, Kota Serang tampak tertinggal dalam hal inovasi kebijakan. Bandung telah melakukan restrukturisasi jaringan trayek dan digitalisasi armada, Bogor melakukan penataan ulang trayek berbasis analisis permintaan perjalanan, sementara Semarang mengadopsi sistem *buy-the-service* untuk meningkatkan kualitas armada angkutan umum (Rahmawati, 2018; Yuliani, 2019). Kota Serang belum melakukan langkah-langkah serupa, sehingga kualitas layanan angkot stagnan dan tidak mampu mengikuti perubahan kebutuhan mobilitas masyarakat modern.

Keterbatasan penelitian mengenai angkot di Kota Serang juga menjadi alasan penting dilakukannya kajian literatur ini. Penelitian yang tersedia cenderung terfokus pada aspek tertentu dan belum memberikan pemahaman komprehensif mengenai penyelenggaraan angkot dari sudut pandang regulasi, kelembagaan, operasional, hingga perubahan mobilitas masyarakat. Penelitian ini hadir untuk menutup kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih menyeluruh.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penyelenggaraan angkot di Kota Serang. Literatur yang ditelaah meliputi regulasi nasional seperti UU No. 22 Tahun 2009, PP No. 74 Tahun 2014, dan UU No. 8 Tahun 1999, serta regulasi daerah seperti Perda Kota Serang No. 13 Tahun 2014 dan Perwal No. 82 Tahun 2022. Penelitian terdahulu berupa skripsi, jurnal ilmiah nasional, dan laporan resmi Dinas Perhubungan Kota Serang juga dianalisis untuk memperoleh gambaran empiris.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode sintesis tematik, di mana setiap temuan dari literatur dikelompokkan berdasarkan isu utama seperti regulasi, pengawasan, kualitas armada, trayek, tarif, serta pengaruh transportasi online. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menyusun gambaran komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan angkot di Kota Serang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka regulasi dengan praktik operasional. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 sebenarnya telah memuat mekanisme penyelenggaraan perhubungan yang cukup komprehensif, mulai dari perizinan trayek, standar pelayanan, hingga pengawasan operasional. Namun penelitian Gustiana (2017) mengungkapkan bahwa pelaksanaan perda tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pengemudi angkot tetap beroperasi meskipun izin trayek telah kedaluwarsa. Deviasi trayek terjadi di hampir semua jalur, dan pelanggaran operasional jarang ditindak oleh otoritas yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat penegakan regulasi yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan tertibnya layanan transportasi.

Pengawasan merupakan aspek yang paling lemah dalam penyelenggaraan angkot di Serang. Laporan Dishub Serang (2021) menyebutkan bahwa jumlah petugas pengawas sangat terbatas, sehingga pelanggaran di lapangan sulit dikontrol. Tidak adanya sistem pengawasan berbasis teknologi membuat pelanggaran hanya diketahui melalui laporan manual atau pengaduan masyarakat. Berbeda dengan kota-kota lain yang mulai mengadopsi teknologi digital seperti sistem GPS tracking atau aplikasi pemantau angkot, Kota Serang masih mengandalkan pola pengawasan tradisional yang sangat bergantung pada kapasitas pegawai.

Kualitas armada juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Armada yang berusia tua menurunkan tingkat kenyamanan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Kusuma (2021), yang menekankan hubungan kuat antara kualitas armada dengan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Ketika masyarakat merasa tidak aman, mereka cenderung memilih moda alternatif meskipun biayanya lebih mahal. Fenomena ini juga teramati di Serang, di mana masyarakat lebih memilih transportasi online karena dianggap lebih nyaman dan dapat diandalkan.

Persoalan trayek juga menjadi isu penting dalam penyelenggaraan angkot. Jaringan trayek yang ada saat ini tidak lagi relevan dengan pola perjalanan masyarakat. Banyak kawasan pemukiman baru, pusat ekonomi, dan fasilitas pendidikan tidak terlayani oleh trayek angkot. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan trayek tidak diperbarui sesuai perkembangan kota. Yuliani (2019) mencatat bahwa kota-kota yang berhasil meningkatkan layanan transportasi adalah kota yang secara rutin melakukan evaluasi trayek berdasarkan perubahan pola pergerakan masyarakat. Praktik evaluasi trayek secara berkala terbukti menjadi strategi penting bagi kota-kota yang ingin mempertahankan kualitas angkutan umumnya. Kota Bogor merupakan contoh yang menonjol, terutama ketika transformasi angkot menuju layanan Biskita Trans Pakuan dilakukan. Proses tersebut mengharuskan pemerintah kota melakukan penataan ulang jaringan trayek berdasarkan perubahan pola perjalanan masyarakat serta perkembangan kawasan permukiman dan pusat aktivitas baru. Evaluasi ini menghasilkan penghapusan rute yang tumpang tindih dan penataan ulang rute angkot agar dapat berfungsi sebagai pengumpan bagi layanan BRT (Kemenhub, 2021; Dishub Kota Bogor, 2022).

Kota Bandung menunjukkan pola serupa. Melalui analisis origin–destination dan pemetaan koridor pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Bandung merestrukturisasi trayek angkot untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Studi Sutrisno dan Purbaya (2020) menegaskan bahwa trayek yang lama tidak lagi relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat urban yang dinamis, sehingga penataan ulang berbasis data mobilitas menjadi faktor utama meningkatnya efektivitas angkutan umum di kota tersebut.

Contoh lain tampak di Kota Surakarta, di mana pemerintah melakukan penyesuaian trayek angkot untuk memastikan angkot dapat berfungsi sebagai pengumpan Batik Solo Trans. Dokumen resmi perencanaan transportasi Surakarta mencatat bahwa perubahan trayek dilakukan berdasarkan analisis pola perjalanan harian masyarakat agar konektivitas antarmoda tetap terjaga dan peran angkot tidak terpinggirkan (Dinas Perhubungan Surakarta, 2019).

Dari berbagai temuan di atas, dapat dirumuskan bahwa kota yang secara aktif melakukan evaluasi dan pembaruan trayek mempunyai peluang lebih besar untuk mempertahankan relevansi angkutan kotanya. Sebaliknya, kota yang tidak melakukan evaluasi akan tertinggal karena jaringan trayek tidak lagi mencerminkan dinamika pergerakan penduduk. Kondisi inilah yang tampak di Kota Serang, di mana ketiadaan evaluasi trayek menyeluruh membuat rute angkot tidak adaptif terhadap perkembangan permukiman, munculnya pusat aktivitas baru, serta pergeseran pola perjalanan masyarakat sehari-hari. Ketidadaan evaluasi trayek membuat angkot semakin tidak menarik dan tidak adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Transportasi online memberikan tekanan besar terhadap keberadaan angkot. Kehadiran layanan seperti ojek online dan mobil daring membuat masyarakat beralih ke moda yang menawarkan kemudahan akses, tarif transparan, dan waktu tunggu singkat. Sari (2021) menjelaskan bahwa banyak pengguna angkot di kota-kota besar bahkan tidak lagi mempertimbangkan angkot sebagai pilihan transportasi utama karena kualitas layanan yang rendah. Fenomena ini juga terjadi di Serang, di mana masyarakat lebih memilih layanan yang memberikan kepastian waktu dan kenyamanan. Penurunan minat masyarakat terhadap angkot juga ditemukan dalam berbagai penelitian di kota-kota lain di Indonesia. Kajian literatur yang disusun oleh Ardelia dan tim (2023) menunjukkan bahwa kehadiran transportasi online telah secara signifikan menggeser pola mobilitas masyarakat, terutama di kota besar, karena layanan berbasis aplikasi dinilai lebih fleksibel, memiliki waktu tunggu yang lebih singkat, serta memberikan kepastian tarif yang tidak dimiliki angkot konvensional (Ardelia et al., 2023). Temuan serupa dilaporkan dalam penelitian mengenai penghasilan sopir angkot di Kota Malang, yang memperlihatkan terjadinya penurunan pendapatan drastis pada trayek-trayek yang sebelumnya padat penumpang akibat banyak pengguna beralih ke transportasi online yang dianggap lebih cepat dan nyaman (Ningrum, 2019). Studi lain di Kota Bandung menguatkan fenomena ini, di mana pengguna angkutan umum cenderung memilih layanan online karena dianggap lebih efisien dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat modern yang menuntut kecepatan dan kepastian perjalanan (Yuliani, 2022). Temuan dari ketiga kota tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas dan keterbatasan layanan angkot menjadikannya semakin tidak diminati, terutama ketika masyarakat memiliki pilihan moda yang lebih kompetitif. Hal ini memperkuat dugaan bahwa fenomena penurunan minat yang terjadi di Kota Serang bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari tren nasional yang mencerminkan perubahan preferensi mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi Kota Serang menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan kota lain yang telah melakukan reformasi transportasi publik secara lebih serius. Bandung melakukan restrukturisasi trayek dan digitalisasi layanan angkot agar lebih kompetitif dengan moda berbasis aplikasi. Kota Bogor menata ulang jaringan trayek secara komprehensif berdasarkan analisis permintaan perjalanan masyarakat dalam rangka integrasi dengan layanan Biskita Trans Pakuan. Sementara itu, Semarang menerapkan skema *buy-the-service*, yaitu model pembelian layanan dari operator oleh pemerintah sehingga standar pelayanan dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Perhubungan. Melalui skema ini, operator mendapatkan pembayaran berbasis

kinerja (performance-based payment), sementara pemerintah menetapkan standar ketepatan waktu, kualitas armada, jadwal operasi, dan kenyamanan penumpang yang harus dipenuhi. Penerapan buy-the-service di Semarang terbukti meningkatkan kualitas armada dan memperbaiki kepastian layanan karena operator tidak lagi bergantung pada setoran harian penumpang, tetapi pada pemenuhan standar pelayanan yang diukur secara rutin (Kemenhub, 2021; Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021). Berbeda dengan kota-kota tersebut, Kota Serang belum mengadopsi reformasi trayek, digitalisasi layanan, maupun skema buy-the-service, sehingga penyelenggaraan angkot di kota ini cenderung stagnan dan tidak mengalami perkembangan berarti.

Melihat berbagai persoalan tersebut, arah pengembangan kebijakan Kota Serang harus berfokus pada reformasi menyeluruh. Regulasi perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan mobilitas modern. Pengawasan juga harus diperkuat melalui penerapan teknologi digital seperti GPS tracking dan aplikasi monitoring, karena teknologi ini memungkinkan pemerintah memantau pergerakan armada secara real-time, mendeteksi pelanggaran trayek, memantau waktu operasi, dan memastikan pengemudi tidak melakukan praktik ngetem berlebihan. Sistem pemantauan berbasis GPS terbukti efektif meningkatkan kepatuhan operator terhadap rute dan jadwal layanan pada berbagai program reformasi transportasi di kota-kota lain, termasuk dalam implementasi skema buy-the-service di Semarang dan kota peserta Program Teman Bus (Kemenhub, 2021). Selain itu, aplikasi monitoring memungkinkan pemerintah menerima laporan digital dari masyarakat, mengarsipkan data operasional, dan menindak pelanggaran secara lebih cepat dan terukur.

Penataan ulang trayek juga harus dilakukan berdasarkan data permintaan perjalanan agar jaringan rute benar-benar sesuai dengan pola pergerakan penduduk dan perkembangan kawasan baru. Modernisasi armada harus menjadi program prioritas dengan melibatkan operator, pemerintah, serta skema pembiayaan yang memungkinkan peremajaan armada secara bertahap. Dengan dukungan pengawasan digital, penataan trayek berbasis data, dan pembaruan armada, penyelenggaraan angkot di Kota Serang dapat berkembang menuju sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan angkot di Kota Serang menghadapi persoalan struktural yang kompleks, mulai dari lemahnya implementasi regulasi, ketidakpatuhan trayek, buruknya kondisi armada, hingga minimnya pengawasan operasional. Kehadiran transportasi online memperburuk posisi angkot sebagai moda transportasi yang tidak kompetitif. Kota Serang perlu melakukan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan berbasis pada kondisi riil mobilitas masyarakat. Penguatan kelembagaan, digitalisasi pengawasan, penataan ulang trayek, modernisasi armada, serta integrasi antarmoda merupakan langkah yang harus segera dilakukan agar angkot dapat terus berperan dalam sistem transportasi Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardelia, R., Putra, F., & Widodo, A. (2023). Literature review: Dampak keberadaan transportasi online terhadap angkutan umum.
- Dinas Perhubungan Kota Bogor. (2022). Laporan penataan jaringan trayek angkutan perkotaan. Bogor: Dinas Perhubungan Kota Bogor.
- Dinas Perhubungan Kota Serang. (2021). Laporan kinerja transportasi Kota Serang. Serang: Dinas Perhubungan Kota Serang.
- Dinas Perhubungan Kota Serang. (2022). Evaluasi operasional angkutan kota. Serang: Dinas Perhubungan Kota Serang.
- Dinas Perhubungan Surakarta. (2019). Dokumen perencanaan Batik Solo Trans. Surakarta:

- Pemerintah Kota Surakarta.
- Gustiana, F. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hardiansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Pedoman penyelenggaraan angkutan umum. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). Transformasi angkot menjadi layanan BRT dalam Program Teman Bus. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kusuma, H. (2021). Analisis efektivitas angkutan kota di Medan. *Jurnal Transportasi*, 10(2), 145–156.
- Ningrum, A. (2019). Dampak transportasi online terhadap pendapatan sopir angkot di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 112–122.
- Nurhaliza, A. (2020). Tantangan angkot di era transportasi online: Studi di Makassar. *Jurnal Ilmu Perhubungan*, 7(1), 20–31.
- Rahmawati, S. (2018). Kualitas pelayanan angkot di Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil dan Transportasi*, 6(3), 112–122.
- Sari, D. (2021). Dampak transportasi online terhadap transportasi konvensional. *Jurnal Mobilitas Perkotaan*, 5(2), 67–79.
- Susilo. (2015). Paratransit transport in Indonesia: Characteristics and user perceptions. *EASTS Conference Proceedings*, 11, 1346–1361.
- Sutrisno, B., & Purbaya, A. (2020). Restrukturisasi trayek angkot Bandung berbasis analisis pergerakan penduduk. *Jurnal Manajemen Transportasi*, 12(1), 55–67.
- Yuliani, E. (2022). Preferensi pengguna terhadap moda transportasi online di Kota Bandung. *Repositori Universitas Pendidikan Indonesia*.